

**BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI**

**PROGRAM
KERJA**

2023



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II VISI, MISI, MOTTO/NILAI, SASARAN, DAN TANTANGAN	
A. Visi	2
B. Misi	2
C. Motto/Nilai	2
D. Sasaran	2
E. Tantangan	2
BAB III KONDISI DAN PERMASALAHAN.....	
A. Kondisi.....	4
B. Permasalahan	6
BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM	
A. Kebijakan.....	7
B. Program.....	7
BAB V PROGRAM KERJA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2022	
1. Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan.....	8
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung.....	18
BAB VI TANTANGAN KEDEPAN.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

Badan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Fungsi pokok manajemen perlu dilaksanakan untuk menjaga dan mengendalikan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan disemua lingkungan peradilan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang yang meliputi bidang administrasi, organisasi dan finansial .

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap instansi harus menerapkan anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja adalah penyusunan anggaran yang memiliki orientasi dan keterukuran output dan outcome sebagai sarana penilaian indikator keberhasilan. Sejalan dengan hal tersebut peningkatan kinerja Badan Pengawasan adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan *good governance* yang harus dilakukan secara terus menerus dalam rangka menunjang tugas Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, serta melakukan pengawasan terhadap perilaku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan adalah merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung juga meliputi organisasi, administrasi dan finansial Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Dalam program kerja Badan Pengawasan tercantum pembinaan dan koordinasi pengawasan, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberdayakan peranan pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan, serta penanganan pengaduan di wilayah hukumnya dengan maksud agar pengawasan yang dilakukan pengadilan tingkat banding bersinergi dengan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

BAB II

VISI, MISI, SASARAN, DAN TANTANGAN

A. Visi

Terwujudnya Pengawasan Yang Mampu Mendorong Aparat Peradilan Yang Berintegritas Dan Berkinerja

B. Misi

Untuk mencapai visi tersebut perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Mengoptimalkan pengawasan melekat dan mengintensifkan pengawasan fungsional yang berbasis teknologi informasi
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur badan pengawasan dan peradilan tingkat banding di bidang pengawasan
3. Meningkatkan fungsi pengawasan yang efektif dan efisien di lingkungan mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya
4. Meningkatkan aparatur yang profesional, bersih, netral, bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat

C. Motto/Nilai

Profesional, transparan, dan komitmen

D. Sasaran

1. Tersedianya rencana pengawasan;
2. Tersedianya bahan kebijakan pengawasan;
3. Tersedianya sumber daya pengawas yang berkualitas;
4. Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan yang memadai;
5. Terlaksananya pengawasan melekat dan fungsional;
6. Terpenuhinya pelayanan pengaduan masyarakat;
7. Tersedianya perangkat publikasi kegiatan pengawasan.

E. Tantangan

1. Masih kurangnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan;
2. Keterbatasan sumber daya yang tersedia;
3. Masih kurangnya dukungan yang berkelanjutan dan komitmen baik dari internal maupun eksternal secara terus menerus;
4. Luasnya jangkauan pengawasan dan semakin bertambahnya jumlah satuan kerja pengadilan di Indonesia;
5. Harapan Pimpinan Mahkamah Agung terhadap Badan Pengawasan untuk menjadi motor penggerak perubahan serta jendela Mahkamah Agung sehingga menuntut

adanya integritas tinggi, profesionalisme serta kreatif dan komunikatif dalam meniasati kelemahan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

BAB III

KONDISI DAN PERMASALAHAN

A. KONDISI

Sebagai dasar perumusan dan pelaksanaan program pengembangan perbaikan sesuai dengan tuntutan masa depan, maka perlu mengenali dan menganalisa secara mendalam kondisi Badan Pengawasan yaitu:

1. Kelembagaan.

Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 Badan Pengawasan yang dipimpin oleh Kepala Badan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung dengan susunan organisasi yang terdiri satu sekretariat Badan dan empat Inspektorat.

2. Sumber Daya Manusia

- a. Jumlah Hakim Tinggi Pengawas sampai dengan Desember 2022 berjumlah 42 orang sedangkan idealnya 66 orang.
- b. Jumlah Hakim Yustisial sampai dengan Desember 2022 berjumlah 25 orang.
- c. Tenaga fungsional Auditor sampai dengan Desember 2022 berjumlah 32 orang.
- d. Tenaga fungsional Auditor Kepegawaian sampai dengan Desember 2022 berjumlah 8 orang.
- e. Pejabat eselon III sebanyak 4 orang dan pejabat eselon IV sebanyak 16 orang.
- f. Tenaga fungsional Analis Kepegawaian pada Badan Pengawasan berjumlah 3 orang dan idealnya 10 orang.
- g. Tenaga fungsional pranata komputer berjumlah 3 orang, fungsional pustakawan berjumlah 2 orang, fungsional arsiparis berjumlah 1 orang, sehingga total 6 orang dan idealnya sebanyak 10 orang.
- h. Jumlah tenaga staf yang ada sebanyak 24 orang sedangkan idealnya sebanyak 50 orang, sementara kekurangan tenaga diisi oleh tenaga administrasi sebanyak 9 orang dan 6 orang sebagai pengemudi

3. Sumber Dana

Anggaran Badan Pengawasan yang tertampung Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp73.575.438.000,-**

4. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran tugas Badan Pengawasan perlu ditindaklanjuti dalam pembagian tugas perlu pengembangan lebih lanjut dukungan sarana teknologi informasi dalam rangka mempermudah pengawasan berbasis elektronik pada tahun anggaran 2023 sehingga sistem informasi tersebut mampu mendukung pengambilan keputusan pimpinan Badan Pengawasan MA RI.

5. Lingkup Kerja Badan Pengawasan

Lingkup kerja Badan Pengawasan meliputi Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di semua lingkungan peradilan 930 satuan kerja dengan wilayah yang luas dan sulit dijangkau dan sering menghadapi kendala di bidang transportasi, komunikasi, iklim, cuaca, hambatan-hambatan geografis, politik, sosial, budaya, dan adat istiadat setempat. Selain itu dengan adanya kebijakan dua DIPA di setiap satker berdampak pada luasnya cakupan pemeriksaan yang mencapai ± 1846 unit pelaporan.

6. Sasaran pengawasan meliputi penyelenggaraan peradilan, perilaku hakim dan aparat peradilan, administrasi peradilan, administrasi umum, serta pelayanan publik yang berpotensi menimbulkan resiko bahaya terhadap fisik dan mental.

7. Wajah Peradilan Dewasa ini

Persepsi publik terhadap integritas dan pelayanan peradilan masih belum maksimal meskipun saat ini peradilan pada empat lingkungan sudah berbenah secara terus menerus melalui peningkatan layanan teknologi informasi, akreditasi dan implementasi zona integritas maupun sistem manajemen anti penyuapan (SMAP).

8. Tantangan Kedepan

Badan Pengawasan sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) mempunyai kewenangan serta berkewajiban memberikan keyakinan memadai (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen, obyektif dan profesional, agar memenuhi kualitas dan kemampuan pelayanan publik di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang berdampak pada kepercayaan masyarakat.

B. PERMASALAHAN.

Memperhatikan kesenjangan antara kondisi yang ada dengan yang seharusnya (ideal), maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara untuk mendekati kondisi yang ada dengan yang seharusnya. Untuk itu diperlukan kebijakan dan program kerja yang menyeluruh agar memperkuat sistem, mekanisme, dan kinerja Badan Pengawasan yang efisien, efektif dan *agile*.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROGRAM

A. KEBIJAKAN

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam program Badan Pengawasan dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyusun kebijakan pengawasan sebagai berikut:

1. Menggunakan pendekatan holistik terhadap pengembangan yang diperoleh atas analisis menyeluruh penyebab kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang ideal;
2. Memprioritaskan kelancaran pelaksanaan pengawasan dan strategi pengurangan kesenjangan berbagai komponen baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi kinerja Badan Pengawasan;
3. Merancang tindakan yang memberikan kontribusi dalam peningkatan efisiensi keseluruhan dalam proses pelaksanaan pengawasan;
4. Memperkuat fungsi Badan Pengawasan sebagai *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
5. Melakukan sosialisasi pengawasan ke daerah-daerah;
6. Mempublikasikan kegiatan pengawasan dan hasil-hasilnya agar diketahui masyarakat melalui teknologi informasi;
7. Melakukan koordinasi, komunikasi dan evaluasi wilayah secara intensif dan sistimatis;
8. Mengefektifitaskan kerjasama antar Instansi;
9. Memperbaiki Sistem Perencanaan berbasis Manajemen Risiko;
10. Peningkatan kuantitas SDM Pengawasan dengan menambah jumlah personil Hakim Tinggi dan Auditor serta peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan, bimtek, in house training atau pelatihan di kantor sendiri;
11. Meningkatkan kegiatan yang bersifat consulting kepada Satker yang berada di Mahkamah Agung serta Badan Peradilan di Bawahnya;
12. Melakukan pemeriksaan Mystery Shopper dan pemeriksaan mendadak (Sidak);
13. Koordinator Asesor PMPRB;
14. Melaksanakan Penilaian Zona Integritas pada empat lingkungan peradilan.
15. Melakukan pembangunan dan evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada empat lingkungan peradilan.

B. PROGRAM

Kebijakan tersebut diatas dilaksanakan melalui program:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
2. Program Dukungan Manajemen.

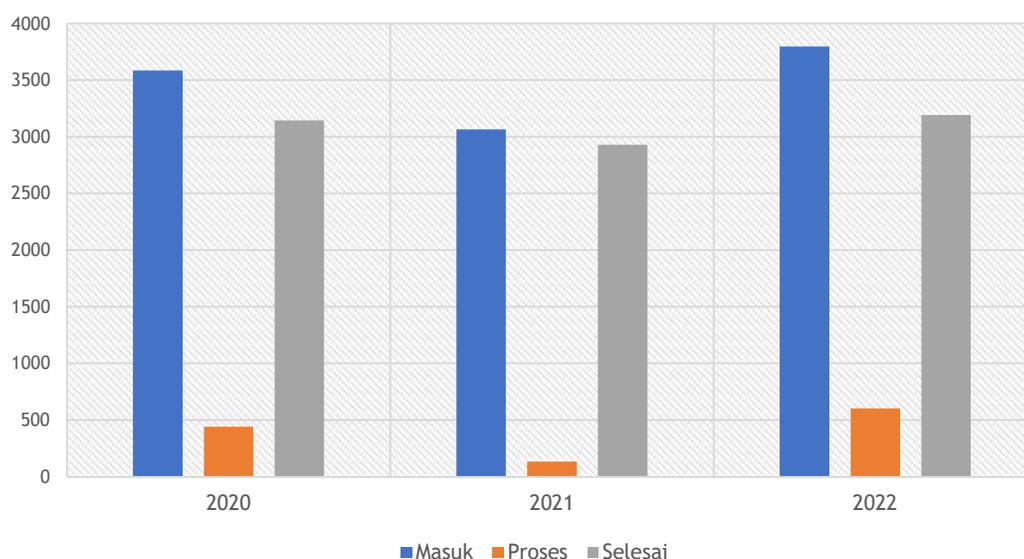
BAB V
PROGRAM KERJA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan arahan pembangunan hukum yang telah digariskan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 - 2024, program kerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung tahun Anggaran 2023 telah melakukan hasil restrukturisasi program bahwa satu Eselon I hanya memiliki satu Program yaitu Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI , terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I, II, III, IV meliputi kegiatan sebagai berikut:

A. Pemeriksaan Kasus

Pada tahun anggaran 2023 diperkirakan Badan Pengawasan akan menangani surat pengaduan ± sejumlah 3.797 pengaduan (data per 27 Desember 2022) yang selesai ditindaklanjuti sebanyak 3193 pengaduan dan masih dalam proses sebanyak 604 pengaduan. Kegiatan pemeriksaan kasus tahun 2023 memiliki target output sebanyak 175 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Berikut merupakan data perbandingan dalam 3 tahun terakhir:



B. Pemeriksaan Reguler

Pemeriksaan reguler akan dilaksanakan di beberapa Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding di Wilayah I, II, III dan IV dengan ruang lingkup pemeriksaan meliputi Manajemen Peradilan, Administrasi Peradilan, Administrasi Persidangan, Administrasi Umum, dan Pelayanan Publik.

Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler untuk **Wilayah I** yang rencana dilaksanakan pada bulan April dan Juni 2023 sebanyak 25 satuan kerja dengan uraian sebagai berikut:

Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan TUN	Peradilan Militer
Aceh 1. PT BANDA ACEH 2. PN BANDA ACEH 3. PN BIREUEN 4. PN SINABANG 5. PN KUALA SIMPANG 6. PN TAKENGON 7. PN KUTACANE 8. PN BLANGKAJEREN 9. PN SUKA MAKMUE 10. PN SABANG 11. PN SINGKIL 12. PN LHOKSUKON	Aceh 1. MS ACEH 2. MS BANDA ACEH 3. MS TAKENGON 4. MS LANGSA 5. MS KUTACANE 6. MS TAPAKTUAN 7. MS BIREUEN 8. MS LHOKSUKON 9. MS KUALASIMPANG 10. MS BLANGKAJEREN 11. MS SABANG 12. MS SINGKIL 13. MS SINABANG	-	-

Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler untuk **Wilayah II** yang rencana dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret 2023 sebanyak 51 satuan kerja dengan uraian sebagai berikut:

Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan TUN	Peradilan Militer
Banten Pengadilan Tinggi Banten Pengadilan Negeri Tangerang Jawa Barat Pengadilan Tinggi Bandung Pengadilan Negeri Depok Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Purwakarta Pengadilan Negeri Sumedang Pengadilan Negeri Ciamis Pengadilan Negeri Subang Pengadilan Negeri Cibadak Pengadilan Negeri Sumber Jawa Tengah Pengadilan Tinggi Semarang Pengadilan Negeri Semarang Pengadilan Negeri Pekalongan Pengadilan Negeri Kudus Pengadilan Negeri Kendal Pengadilan Negeri	Banten Pengadilan Agama Cilegon Pengadilan Agama Pandeglang Pengadilan Agama Rangkasbitung Jawa Barat Pengadilan Tinggi Agama Bandung Pengadilan Agama Bandung Pengadilan Agama Bekasi Pengadilan Agama Bogor Pengadilan Agama Cirebon Pengadilan Agama Sukabumi Pengadilan Agama Cikarang Pengadilan Agama Karawang Pengadilan Agama Cianjur Pengadilan Agama Indramayu Pengadilan Agama Depok Pengadilan Agama	Jawa Barat PTUN Bandung	Jawa Barat Dilmil II-09 Bandung

Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan TUN	Peradilan Militer
Purwodadi Pengadilan Negeri Salatiga Pengadilan Negeri Ungaran Pengadilan Negeri Jepara Pengadilan Negeri Blora Pengadilan Negeri Rembang Pengadilan Negeri Batang Jawa Timur Pengadilan Tinggi Surabaya Pengadilan Negeri Banyuwangi Pengadilan Negeri Sidoarjo Pengadilan negeri Surabaya	Purwakarta Pengadilan Agama Garut Pengadilan Agama Sumedang Pengadilan Agama Ciamis Pengadilan Agama Kuningan Pengadilan Agama Subang Pengadilan Agama Cibadak Pengadilan Agama Sumber		

Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler untuk **Wilayah III** yang rencana dilaksanakan pada bulan Maret, April, dan Juni 2023 sebanyak 27 satuan kerja dengan uraian sebagai berikut:

Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan TUN	Peradilan Militer
Gorontalo Pengadilan Negeri Marissa Kalimantan Barat Pengadilan Negeri Putusibau Pengadilan Negeri Bengkayang Kalimantan Selatan Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Tanjung Kalimantan Tengah Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Muara Teweh Kalimantan Timur Pengadilan Negeri Tanjung Redep Sulawesi Selatan Pengadilan Negeri Malili Sulawesi Tengah Pengadilan Tinggi Palu Sulawesi Utara Pengadilan Negeri Melonguane	Gorontalo Pengadilan Agama Kwandang Kalimantan Barat Pengadilan Agama Sintang Kalimantan Selatan Pengadilan Agama Tanjung Kalimantan Tengah Pengadilan Agama Muara Teweh Kalimantan Timur Pengadilan Agama Tanjung Redep Pengadilan Agama Tarakan Sulawesi Selatan Pengadilan Agama Bulukumba Pengadilan Agama Pasangkayu Pengadilan Agama Watampone Sulawesi Tengah Pengadilan Agama Palu Pengadilan Agama Buol Sulawesi Utara Pengadilan Agama Bolaang Uki Pengadilan Agama Tutuyan	Sulawesi Tenggara PTUN Kendari	-

Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan TUN	Peradilan Militer
	Sulawesi Tenggara Pengadilan Agama Lasusua Pengadilan Agama Rumbia		

Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler untuk **Wilayah IV** yang rencana dilaksanakan pada Juni 2023 sebanyak 10 satuan kerja sebagai berikut:

Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan TUN	Peradilan Militer
Maluku Utara Pengadilan Tinggi Agama Ternate Nusa Tenggara Timur Pengadilan Negeri Lembata Pengadilan Negeri Rote Ndao Papua Barat Pengadilan Negeri Manokwari Papua	Maluku Utara Pengadilan Agama Labuha Pengadilan Agama Masohi Nusa Tenggara Timur Pengadilan Agama Bajawa Papua Barat Pengadilan Agama Manokwari	-	-

Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan TUN	Peradilan Militer
Pengadilan Negeri Serui Pengadilan Negeri Kota Timika			

C. Audit Kinerja

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 50 ayat (2), Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.

Tujuan dari audit kinerja adalah menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E). Audit fokus pada area yang mampu memberi nilai tambah dan memiliki potensi untuk perbaikan berkelanjutan.

Pada prinsipnya audit kinerja terkait dengan hubungan antara *input*, *output*, proses, dan *outcome*.

- *Input* adalah sumber daya dalam bentuk dana, sumber daya manusia (SDM), peralatan, dan material yang digunakan untuk menghasilkan output.
- *Output* adalah barang-barang yang diproduksi, jasa yang diserahkan/diberikan, atau hasil-hasil lain dari proses atas input.
- Proses adalah kegiatan-kegiatan operasional yang menggunakan input untuk menghasilkan output.
- *Outcome* adalah tujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui output.

Pelaksanaan Audit Kinerja untuk **Wilayah I** yang rencana dilaksanakan pada bulan Juni 2023 sebanyak 16 satuan kerja dengan uraian sebagai berikut:

Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan TUN	Peradilan Militer
Bangka Belitung Pengadilan Negeri Pangkal Pinang	Bengkulu Pengadilan Agama Lebong	Bangka Belitung PTUN Pangkal Pinang	-
Bengkulu Pengadilan Negeri Bintuhan	Jambi Pengadilan Agama Sungai Penuh	Lampung PTUN Bandar Lampung	
Jambi	Lampung		

Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan TUN	Peradilan Militer
Pengadilan Negeri Sengeti Riau Pengadilan Negeri Tembilahan Sumatera Barat Pengadilan Negeri Solok Sumatera Selatan Pengadilan Negeri Lahat Pengadilan Negeri Palembang Sumatera Utara Pengadilan Negeri Rantau Prapat	Pengadilan Agama Krui Riau Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Sumatera Barat Pengadilan Agama Sijunjung Sumatera Utara Pengadilan Agama Pematang Siantar		

Pelaksanaan Audit Kinerja untuk **Wilayah II** yang rencana dilaksanakan pada bulan Juli 2023 sebanyak 20 satuan kerja dengan uraian sebagai berikut:

Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan TUN	Peradilan Militer
DKI Jakarta Pengadilan Tinggi Jakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Pengadilan Tinggi Yogyakarta Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Wates Pengadilan Negeri Yogyakarta Pengadilan Negeri Bantul Pengadilan Negeri Wonosari Banten Pengadilan negeri Serang Pengadilan negeri Pandeglang Pengadilan negeri Rangkasbitung	DKI Jakarta Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Pengadilan Agama Sleman Pengadilan Agama Wates Pengadilan Agama Yogyakarta Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Wonosari	DKI Jakarta PT TUN Jakarta Daerah Istimewa Yogyakarta PTUN Yogyakarta Banten PTUN Serang	

Pelaksanaan Audit Kinerja untuk **Wilayah III** yang rencana dilaksanakan pada bulan Juni 2023 sebanyak 27 satuan kerja dengan uraian sebagai berikut:

Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan TUN	Peradilan Militer
Kalimantan Barat Pengadilan Negeri Ngabang Pengadilan Negeri Sambas Kalimantan Selatan Pengadilan Negeri Marabahan Pengadilan Negeri Martapura Kalimantan Tengah Pengadilan Negeri Kuala Kurun Pengadilan Negeri Sampit Kalimantan Timur Pengadilan Negeri Kutai Barat Pengadilan Negeri Penajam Sulawesi Selatan Pengadilan Negeri Pasangkayu Pengadilan Negeri Belopa Sulawesi Tengah Pengadilan Negeri Poso Sulawesi Tenggara Pengadilan Negeri Andolo Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Sulawesi Utara Pengadilan Negeri Tahuna Pengadilan Negeri Amurang	Gorontalo Pengadilan Agama Tilamuta Kalimantan Barat Pengadilan Agama Pontianak Kalimantan Selatan Pengadilan Agama Kandangan Kalimantan Timur Pengadilan Agama Penajam Sulawesi Selatan Pengadilan Agama Malili Pengadilan Agama Belopa Sulawesi Tengah Pengadilan Agama Parigi Pengadilan Agama Poso Sulawesi Tenggara Pengadilan Agama Pasarwajo Sulawesi Utara Pengadilan Agama Tondano	Gorontalo PTUN Gorontalo Kalimantan Tengah PTUN Palangkaraya	

Pelaksanaan Audit Kinerja untuk **Wilayah IV** yang rencana dilaksanakan pada Juni 2023 sebanyak 14 satuan kerja dengan uraian sebagai berikut:

Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan TUN	Peradilan Militer
Maluku Utara Pengadilan Negeri Sanana Nusa Tenggara Barat Pengadilan Negeri Dompu Pengadilan Negeri Mataram Papua Pengadilan Negeri Nabire Pengadilan Negeri	Maluku Utara Pengadilan Agama Morotai Pengadilan Agama Sanana Pengadilan Agama Soa Sio Nusa Tenggara Barat Pengadilan Agama Bima Pengadilan Agama Dompu	-	-

Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan TUN	Peradilan Militer
Merauke	Pengadilan Agama Taliwang Papua Pengadilan Agama Biak Pengadilan Agama Sorong Pengadilan Negeri Merauke		

D. Peningkatan Zona Integritas Wilayah I, II, III, IV

- *Pembangunan Zona Integritas*, berdasarkan SK KMA Nomor 75A/KMA/SK/IV/2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan pada April dan Mei 2023 dengan *output* sebanyak 120 LHP serta memiliki dukungan anggaran sebesar Rp4.200.000.000,-.
- *Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan*, melalui penerapan SMAP diharapkan dapat mendorong pengadilan untuk merencanakan tindakan dalam mengatasi risiko dan peluang peningkatan penyuapan. Selain itu, SMAP membantu pengadilan untuk mengintegrasikan dan menerapkan sistem anti penyuapan yang sudah ada pada setiap unit pelayanan. Kegiatan ini meliputi monev SMAP dan rencananya akan dilaksanakan pada Januari, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November dengan *output* sebanyak 60 LHP serta memiliki dukungan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,-.

E. Evaluasi LKJiP

Pelaksanaan Evaluasi LKJiP direncanakan dilaksanakan pada:

Inspektorat Wilayah	Tanggal Pelaksanaan	Satuan Kerja
I		Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Syarriyah Aceh Pengadilan Tinggi Jambi dan Pengadilan Tinggi Agama Jambi
II		Pengadilan Tinggi Jakarta Pengadilan Tinggi Agama Bandung Pengadilan Tinggi Semarang Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
III		Pengadilan Tinggi Samarinda dan Pengadilan Tinggi

Inspektorat Wilayah	Tanggal Pelaksanaan	Satuan Kerja
		Agama Samarinda Pengadilan Tinggi Manado dan Pengadilan tinggi Agama Manado
IV		Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram

F. Reviu

- **Reviu RKA KL**

Reviu RKA KL direncanakan dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu Reviu RKA K/L Indikatif, Reviu RKA K/L Pagu, dan Reviu RKA K/L Alokasi. Satuan kerja terkait yakni Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi yang termasuk dalam cakupan Wilayah II.

- **Reviu Laporan Keuangan**

Reviu LK akan dilaksanakan pada Februari, Juli, dan Oktober 2023 yang terdiri dari Reviu LK Tahun 2022 (Rekonsiliasi), Reviu LK Tahun 2022, Reviu LK Semester I Tahun 2023, dan Reviu LK Triwulan III Tahun 2023. Satuan kerja terkait yakni Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi yang termasuk dalam cakupan Wilayah II.

- **Reviu PNBP**

Reviu PNBP akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023. Satuan Kerja terkait yaitu Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi yang termasuk dalam cakupan Wilayah II.

- **Reviu Hibah**

Reviu Hibah akan dilaksanakan kali pada bulan Februari, Juli, Oktober, dan November 2023. Satuan Kerja terkait yaitu Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi yang termasuk dalam cakupan Wilayah II.

- **Reviu Pernyataan Telah Direviu**

Reviu/pernyataan telah direviu direncanakan akan memiliki *output* sebanyak 12 LHP.

- **Evaluasi SPIP**

Evaluasi SPIP rencananya akan dilaksanakan pada bulan April dan Juni serta memiliki *output* sebanyak 2 LHP.

- **Evaluasi RB**

Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) rencananya akan dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni serta memiliki *output* sebanyak 2 LHP.

- **Monev PIPK**

Monev PIPK rencananya akan dilaksanakan pada bulan Januari, Februari, Juli, dan Oktober 2023 memiliki *output* sebanyak 4 LHP.

- **Monev Pronas dan Kinerja Anggaran**

Monev PIPK rencananya akan dilaksanakan sebanyak pada bulan April, Juli, Oktober, dan Desember 2023 memiliki *output* sebanyak 4 LHP.

G. Analisis Kebijakan dan Administrasi Penanganan Pengaduan

Analisa kebijakan merupakan rumusan kebijakan untuk perbaikan kebijakan pengawasan dalam lingkup masing masing inspektorat wilayah yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai rumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran dan pengawasan baik tahun anggaran berjalan maupun tahun yang akan datang. Kegiatan ini memiliki 4 output LHP. Administrasi penanganan pengaduan merupakan rumusan hasil penanganan pengaduan yang dikelola masing masing inspektorat wilayah yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan manajemen dalam menangani tugas pokok penanganan pengaduan terdiri dari 4 output LHP.

H. Supervisi Pengawasan

Supervisi pengawasan merupakan kebijakan baru sebagai bentuk penerjemahan tata kelola pemeriksaan yang melibatkan pimpinan MA dan Kepala Badan Pengawasan dalam memastikan proses dan prosedur pengawasan tepat sasaran dan sekaligus sebagai forum pembinaan yang lebih efektif dengan target 38 LHP.

2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung, ini meliputi :

a. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bawas
Pelaksanaan kegiatan LKJiP 2023 rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember 2023, sedangkan kegiatan terkait lainnya yakni penyempurnaan LKJiP 2022 akan dilaksanakan pada Januari 2023.
2. Pengelolaan LHP Kasus
Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April 2023
3. Laporan Tahunan (Laptah) Bawas
Pelaksanaan kegiatan Laporan Tahunan 2023 rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember 2023, sedangkan kegiatan terkait lainnya yakni penyempurnaan Laporan Tahunan 2022 akan dilaksanakan pada Januari 2023.
4. Reformasi Birokrasi Bawas
Pelaksanaan kegiatan RB rencananya akan dilaksanakan pada bulan Maret 2023.
5. Internal Audit Capability Model (IA-CM)
Pelaksanaan kegiatan IA-CM rencananya akan dilaksanakan pada bulan April 2023 dan 3 kegiatan selanjutnya belum ditentukan jadwal pelaksanaan.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Kegiatan ini dilaksanakan mulai Januari sd Desember 2023 untuk memastikan pengumpulan evidence di internal Badan Pengawasan MA RI dapat terpenuhi sesuai dengan target waktu yang ditetapkan evaluator SPIP.
7. Evaluasi SOP/Penyusunan Pedoman
Penyusunan pedoman merupakan upaya berkelanjutan untuk melaksanakan perbaikan tata kelola manajemen maupun tata kelola pemeriksaan yang menjadi tugas Badan Pengawasan. Kegiatan ini dilaksanakan sepanjang tahun dengan melibatkan semua unsur aparatur yang ditunjuk pimpinan maupun pihak eksternal sebagai narasumber untuk mempertajam kualitas rumusan pedoman yang nantinya dihasilkan dan digunakan oleh Badan Pengawasan MA RI dan satuan kerja dibawahnya.

b. Layanan Umum

1. Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran Pimpinan
Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan sepanjang tahun sesuai agenda pimpinan antara lain menghadiri undangan instansi lain atau rapat pimpinan Mahkamah Agung yang didampingi oleh ajudan dan pejabat yang ditunjuk.

2. Tata administrasi kearsipan
Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dua kali yakni bulan Juli dan Desember 2023.
3. Pameran LAPTAH MA
Pelaksanaan kegiatan ini februari 2023.

c. Layanan Data dan Informasi

1. Terintegrasi SIWAS, Bawas Care, E-Monev dan Aplikasi PMPZI
Kegiatan Ini dilaksanakan pada bulan Januari sd Desember 2023 karena update atau pengembangan fitur baru sesuai dengan hasil evaluasi maupun permintaan stakeholder.

d. Layanan Perkantoran

Pelaksanaan kegiatan Ini dilaksanakan pada bulan Januari sd Desember 2023 dilaksanakan oleh bagian umum dan keuangan meliputi

1. Pembayaran gaji dan tunjangan
2. Perawatan kendaraan dinas roda 4
3. Perawatan Kendaraan roda 2
4. Kegiatan operasional perkantoran
5. Perawatan kendaraan dinas roda 6
6. Pengiriman surat dinas
7. Sewa fotocopy
8. Pemeliharaan peralatan perkantoran
9. Jamuan rapat/koordinasi/terima tamu/delegasi
10. Sewa Mobil Operasional
11. Pemeliharaan jaringan/system informasi dan peralatan IT
12. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

e. Layanan Sarana Internal

Layanan sarana internal meliputi belanja modal peralatan dan mesin sound system ruang rapat Lt 11 dan sarana infrastruktur internet lt 8,9,11 dan dilaksanakan pada Januari sd Maret 2023.

1. Layanan Sarana Internal
2. Pengadaan sarana infrastruktur internet Badan Pengawasan Lantai 8,9, dan 11

f. Layanan Manajemen SDM

Pelaksanaan kegiatan Ini bulan Januari sd Desember 2023 oleh bagian Kepegawaian dan panitia yang ditunjuk oleh Pimpinan.

1. Penyusunan ABK (Hakim Tinggi, Hakim Yustisial, JAF Dan Pelaksana)
2. Rekonsiliasi Data Hukuman Disiplin (Satya Lencana)
3. LHKPN
4. Assesment

5. Penerapan PP NO.30 Tahun 2019 (Narsum BKN)
6. Mekanisme KP GOL IV/C Keatas Dan Kenaikan Pangkat (NARSUM : BKN/BPKP/BPS)
7. Pencantuman Gelar Pasca Tugas/Izin Belajar (Narsum BKN)
8. Pengembangan SDM
9. Pembinaan Pengelolaan Untuk Sekretariat Panitia Dupak Auditor & Penyusun
10. Pelantikan Eselon IV, Hakim Yustisial Dan Auditor
11. Pembekalan Untuk Aparatur Bawas (Narsum Hakim Senior)
12. Pembinaan Administrasi PNS (Narsum BKN)
13. Penyusunan Standar Kompetensi (Pembuatan Dan Reviu)

g. Layanan Perencanaan dan Penganggaran

1. Penyusunan Rencana dan Program
Kegiatan ini meliputi
 1. Reviu Renstra dan Reviu IKU dilaksanakan pada bulan Januari 2023,
 2. Penyusunan Baseline TA 2024 dilaksanakan pada bulan Januari 2023,
 3. Pagu Indikatif 2024 dilaksanakan pada bulan Februari 2023,
 4. Pagu Alokasi 2024 dilaksanakan pada bulan Oktober 2023
 5. Penyusunan Program Kerja TA 2024 dilaksanakan pada bulan Desember 2023.

h. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

1. Hakim Pengawas Bidang
Pelaksanaan kegiatan Rakor Hakim Pengawas Bidang wilayah IV bertempat di Jayapura pada bulan Maret 2023
2. Penanganan Pengaduan
Pelaksanaan kegiatan Rakor Penanganan Pengaduan Wakil Tk Banding di Jakarta pada bulan juli 2023 dan Rakor Penanganan Pengaduan Wakil Tk Banding di Jakarta pada Bulan Agustus 2023.
3. Quality Assurance
Kegiatan Ini dilaksanakan pada bulan Februari 2023.
4. Consulting
Kegiatan Ini dilaksanakan pada bulan Februari 2023.
5. TLHP BPK
Kegiatan Ini dilaksanakan pada bulan Januari sd Desember 2023
6. LO
Kegiatan Ini dilaksanakan pada bulan Januari sd Desember 2023
7. Pemeriksaan lintas propinsi / tujuan tertentu/cek fisik / saber pungli / investigasi / unit intelejen / sidak / MS
Kegiatan Ini dilaksanakan pada bulan Januari sd Desember 2023

8. Pemanggilan Pemeriksaan

Kegiatan Ini dilaksanakan pada bulan Januari sd Desember 2023

9. Kerjasama antar Pemerintah

Kegiatan Ini dilaksanakan pada bulan Januari sd Desember 2023

10. Sidang MKH

Kegiatan Ini dilaksanakan pada bulan Januari sd Desember 2023

i. Layanan Manajemen Keuangan

1. Pengelolaan Perbendaharaan

Kegiatan Ini dilaksanakan pada bulan Januari sd Desember 2023 meliputi LPJ Bendahara, Pertanggungjawaban uang persediaan dan administrasi pertanggungjawaban belanja.

2. Pengelolaan Laporan Keuangan

Kegiatan Ini dilaksanakan pada bulan Januari sd Desember 2023 meliputi penyusunan laporan keuangan, rekonsiliasi dan pelaporan monev kinerja anggaran.

j. Kegiatan lain lain

a. Launching Majalah Badan Pengawasan bulan Juni 2023.

BAB VI TANTANGAN KEDEPAN

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah “Fungsi Pengawasan Peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung”.

Tantangan kedepan Badan Pengawasan diantaranya:

1. Badan Pengawasan sebagai APIP (aparatus pengawasan intern pemerintah) mempunyai kewenangan serta berkewajiban memberikan kepastian (assurance) dan konsultasi (consulting) yang bersifat independen, obyektif dan profesional, agar memenuhi kualitas dan kemampuan pelayanan publik di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat dalam menerima layanan.
2. Meningkatkan level Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP menuju Level IV.
3. Luasnya jangkauan pengawasan dan semakin bertambahnya jumlah satuan kerja pengadilan di Indonesia.
4. Semakin bertambahnya kegiatan yang dibebankan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai koordinator kegiatan PMPRB Mahkamah Agung RI dan quality assurance pelaksanaan RB di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, tim penilai implementasi zona integritas menuju WBK dan WBBM, dan tim penilai sistem manajemen anti penyuapan.

Program kerja tahun 2023 Badan Pengawasan Mahkamah Agung disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2024 yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Sasaran dan program yang telah ditetapkan, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kerja tahunan (RKT).

Berhasilnya pelaksanaan program kerja tahun 2023 Badan Pengawasan Mahkamah Agung sangat tergantung pada peran aktif aparat pelaksana dan dukungan anggaran dari pemerintah serta pihak-pihak terkait. Akhirnya program kerja tahun 2023 ini dapat dijadikan bahan kajian yang terus disempurnakan untuk bahan perencanaan selanjutnya bagi keberhasilan tugas dan fungsi Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Jakarta, Januari 2023

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI



SUGIYANTO

